



DINAS SOSIAL
KOTA METRO



RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL KOTA METRO

2026

Kata Pengantar

Puji syukur kita ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Renja Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan atas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2025–2029. Dokumen ini disusun berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta sejalan dengan arah RPJMD Kota Metro 2025–2029, khususnya Misi ke-3: “Membangun Ekonomi dan Sosial yang Inklusif serta Berdaya Saing.”

Penyusunan dokumen ini dimaksudkan untuk memperkuat kesinambungan pembangunan sosial yang terarah, terukur, dan berkelanjutan, dengan menekankan pada peningkatan kualitas layanan sosial, perlindungan masyarakat rentan, pemberdayaan sosial, serta penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja 2026 ini masih terdapat keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen ini pada masa mendatang. Semoga Renja ini dapat menjadi pedoman yang efektif bagi Dinas Sosial Kota Metro dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Metro.

Metro, September 2025

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA METRO



DR. YULI WATI, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 196807031993022001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penyusunan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Perangkat Daerah	30
2.4. Riview terhadap rancangan awal RKPD	31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	36
3.3. Tujuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Metro	39
3.4. Program dan Kegiatan Prioritas	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Metro	63
BAB V PENUTUP	
	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan Renja ini mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2025–2029.

Dalam RPJMD tersebut, visi pembangunan daerah adalah “Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius.” Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Sosial berperan penting dalam misi ke-3 yaitu: “Membangun Ekonomi dan Sosial yang Inklusif serta Berdaya Saing.”

Sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat strategis, Dinas Sosial Kota Metro diarahkan untuk menyelenggarakan pelayanan sosial yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan kelompok rentan, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penyusunan Renja Tahun 2026 tidak hanya ditujukan untuk menjaga kesinambungan program prioritas, tetapi juga untuk menjawab isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat.

Lebih lanjut, penyusunan Renja Tahun 2026 memperhatikan arah strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2025–2029. Renstra tersebut dirumuskan dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagaimana

diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sekaligus mendukung sasaran RPJMD Kota Metro. Tujuan utama yang hendak dicapai adalah “Terwujudnya pelayanan sosial yang prima dan inklusif,” yang diterjemahkan lebih lanjut ke dalam sasaran strategis, yaitu meningkatnya pelayanan publik bidang sosial serta meningkatnya layanan perlindungan sosial yang tepat guna dan tepat sasaran.

Untuk mengukur keberhasilan, Renstra telah menetapkan indikator, baseline, dan target yang akan dicapai hingga tahun 2030, seperti: persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat pelayanan, nilai pelayanan publik melalui Survey Kepuasan Masyarakat, serta cakupan perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan rentan. Dengan adanya indikator yang jelas, Renja Tahun 2026 memiliki pijakan kuat agar setiap program yang dilaksanakan tetap relevan dengan sasaran strategis jangka menengah.

Dengan demikian, Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2026 bukan hanya sekadar dokumen perencanaan tahunan, tetapi juga instrumen penting yang menjembatani kesinambungan antara Renstra 2025–2029, RPJMD 2025–2029, dan kebutuhan riil masyarakat. Renja ini menjadi pedoman koordinasi, sinkronisasi, serta pengendalian pembangunan sosial yang inklusif, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Metro.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2026 merupakan acuan normatif agar proses perencanaan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan landasan hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
- c. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga;
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- i. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial;
- j. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- k. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- m. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
- n. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- o. Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No.144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4451);
- p. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Bencana;
- q. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- r. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat;
- s. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan & Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
- t. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro tahun 2005-2025.
- u. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2016-2021.
- v. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro, yang telah diubah dan disempurnakan melalui Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019, mengatur secara keseluruhan struktur, tugas, dan susunan organisasi Perangkat Daerah Kota Metro
- w. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;

- x. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

a) Maksud.

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2026 yaitu untuk menciptakan komitmen yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial selama satu tahun anggaran, sekaligus mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2025–2029.

Renja ini juga berfungsi sebagai pedoman perencanaan kinerja tahunan yang selaras dengan visi “Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius”, khususnya mendukung Misi ke-3: “Membangun Ekonomi dan Sosial yang Inklusif serta Berdaya Saing.”

Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renja 2026 tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari kesinambungan NSPK, tujuan, sasaran, indikator, baseline, dan target pembangunan sosial tahun 2025–2030, sehingga arah kebijakan yang ditetapkan benar-benar terukur, relevan, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

b) Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2026 bertujuan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Sosial dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program serta kegiatan selama tahun anggaran 2026, sehingga konsisten dengan arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam Renstra 2025–2029;
2. Menjadi pedoman resmi dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan setiap bidang di Dinas Sosial, sekaligus memastikan keterpaduan dengan NSPK serta arah pembangunan sosial dalam RPJMD Kota Metro;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial, sehingga anggaran dapat dialokasikan secara tepat, efektif, dan efisien sesuai prioritas pembangunan sosial, indikator kinerja, serta target tahunan yang diturunkan dari baseline Renstra;
4. Memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan tahunan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro serta amanat peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
5. Menjadi instrumen koordinasi dan sinkronisasi antarbidang dan antarperangkat daerah untuk mencapai sinergi yang optimal dalam penyelenggaraan pembangunan sosial, sehingga berdampak maksimal pada kesejahteraan masyarakat Kota Metro, terutama kelompok rentan, sesuai sasaran dan indikator kinerja utama dalam Renstra 2025–2029.

1.4. Sistematika Penyusunan Renja

Penulisan Renja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan Renja

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

- 1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 1.3 Tujuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Metro
- 1.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Metro

BAB V PENUTUP

Bab Penutup memuat rangkuman atas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2026, yang menggambarkan capaian, pembelajaran, serta hal-hal penting yang menjadi perhatian untuk perbaikan di masa mendatang.

Selain itu, bagian ini juga terbuka bagi masukan, kritik, dan saran yang konstruktif, guna menyempurnakan penyajian maupun implementasi Renja pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya menjadi laporan tahunan, tetapi juga instrumen strategis yang menjaga kesinambungan antara Renja dengan arah kebijakan Renstra 2025–2029, NSPK, serta RPJMD Kota Metro.

Harapannya, Renja 2026 dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target pembangunan sosial 2025–2030, sehingga semakin relevan, adaptif, dan bermanfaat dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Metro, khususnya kelompok rentan.

B A B II

HASIL EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.

Penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2026 didasarkan pada evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya. Karena capaian tahun 2025 belum final, dasar evaluasi yang digunakan adalah kinerja tahun 2024. Secara umum, Renja 2024 konsisten dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra 2021–2026 serta RPJMD 2025–2029. Program difokuskan pada perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat rentan, dan penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Hasilnya cukup positif: realisasi pelaksanaan program mencapai 95,88% (RFK 2024), sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tercapai 100%, terutama pada layanan PPKS. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas anggaran sekaligus capaian layanan sosial dasar, penurunan kemiskinan, dan penguatan kelembagaan masyarakat. Dengan demikian, capaian 2024 menjadi pijakan penting bagi penyusunan Renja 2026, sekaligus memastikan kesinambungan dengan Renstra 2025–2029, NSPK, dan RPJMD Kota Metro. Evaluasi ini berfungsi sebagai tolok ukur tahunan untuk menjaga relevansi, keterukuran, serta keterhubungan Renja dengan target pembangunan sosial 2025–2030.

Adapun capaian program dan kegiatan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Memasuki tahun 2024, pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah masih konsisten menunjukkan hasil yang optimal. Kualitas pelayanan administrasi perkantoran tetap terjaga dengan baik dalam mendukung kelancaran tugas Dinas Sosial secara keseluruhan. Realisasi indikator kinerja tercatat sebesar 96,01% berdasarkan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK), dan apabila ditinjau dari sisi capaian

kinerja, target serta realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2024 berhasil tercapai 100%.

Hal ini mencerminkan bahwa aspek penunjang kelembagaan, khususnya pada bidang perencanaan, penganggaran, dan pelayanan administrasi, berjalan efektif serta berkontribusi positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana diarahkan dalam Renstra Dinas Sosial 2021–2026. Adapun kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

a). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Kegiatan terlaksana tepat waktu sesuai standar, dengan realisasi dokumen perencanaan dan evaluasi 98,02% (RFK) dan capaian kinerja 100%. Hal ini mencerminkan tata kelola yang akuntabel dan konsisten dengan Renstra 2021–2026.

b). Administrasi Keuangan

Pengelolaan keuangan berjalan tertib, meliputi gaji, tunjangan, dan tugas ASN dengan serapan anggaran 97,72%. Capaian kinerja tercapai 100%, menegaskan efektivitas pengelolaan keuangan yang akuntabel.

c). Administrasi Umum

Pemenuhan sarana dan prasarana terealisasi 97,13% dengan capaian kinerja 100%. Dukungan administrasi umum berjalan efektif sekaligus memperkuat kelancaran layanan dan program.

d). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Terlaksana baik dengan realisasi 88,10% dan capaian kinerja 100%. Sinergi anggaran dan kinerja ini mendukung konsistensi pelaksanaan program.

e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Pemeliharaan sarana dan prasarana tercapai 99,08% dengan capaian kinerja 100%. Hal ini menegaskan kesiapan fasilitas dalam mendukung efektivitas pelayanan dan program.

2. Program Pemberdayaan Sosial.

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial Tahun 2024 menunjukkan hasil baik dengan capaian kinerja 98,04% dan indikator utama (PSKS berkualifikasi terampil) tercapai penuh melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas. Hal ini menegaskan konsistensi dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat peran PSKS sebagai mitra strategis pelayanan sosial.

Capaian kinerja juga berhasil direalisasikan 100%, mencerminkan efektivitas program sekaligus memperkuat keberlanjutan intervensi. Sepanjang 2024, peningkatan kapasitas PSKS diwujudkan melalui pelatihan, fasilitasi, dan penguatan kelembagaan sosial. Keberhasilan ini menjadi pijakan penting untuk memperluas inovasi dan partisipasi aktif masyarakat, sehingga pemberdayaan sosial semakin terarah dan berdampak nyata.

3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal pada Tahun 2024 tidak terealisasi, baik dari sisi anggaran berdasarkan RFK (0%) maupun dari sisi pelaksanaan kegiatan (0%). Kondisi ini terjadi karena tidak terdapat laporan kasus yang membutuhkan intervensi pemulangan selama tahun berjalan.

Meskipun demikian, keberadaan program ini tetap penting sebagai langkah antisipatif dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi warga negara migran korban tindak kekerasan. Dengan dasar tersebut, program ini tetap dipertahankan dalam perencanaan Renja 2026 sebagai bentuk kesiapsiagaan Dinas Sosial Kota Metro dalam merespons apabila terdapat kasus serupa di masa mendatang. Hal ini juga selaras dengan arah kebijakan Renstra Dinas Sosial 2025–2029, yang menekankan pada perlindungan sosial komprehensif, terutama bagi kelompok rentan yang menghadapi risiko eksploitasi maupun kekerasan lintas wilayah.

4. Program Rehabilitasi Sosial

Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Tahun 2024 berjalan baik dengan capaian 88,78%. Indikator PPKS mandiri tercapai melalui pendampingan, pemberdayaan, dan akses layanan sosial, disertai realisasi target penuh (100%). Hasil ini menegaskan efektivitas program sekaligus menjadi pijakan untuk memperluas jangkauan dan memperdalam intervensi rehabilitasi.

a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Realisasi kegiatan tahun 2024 mencapai 85,73% dari sisi pelaksanaan dan 100% dari capaian target, melalui layanan sosial dasar, pendampingan, serta pemenuhan kebutuhan pokok bagi kelompok rentan. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas program dalam memperkuat perlindungan sosial, sekaligus menjadi pijakan penting untuk memperluas cakupan layanan agar lebih banyak kelompok rentan terlayani optimal.

b). Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya di luar panti pada tahun 2024 menunjukkan realisasi 90,78%, dengan capaian target kinerja 100%. Layanan konseling, rujukan, dan pemberdayaan sosial berjalan berkesinambungan, menegaskan konsistensi Dinas Sosial dalam memberikan perhatian layak kepada kelompok rentan. Keberhasilan ini menjadi landasan penting untuk memperkuat kualitas serta memperluas jangkauan layanan rehabilitasi sosial.

5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pelaksanaan program tahun 2024 mencapai indikator 94,32%, dengan realisasi target penuh 100%. Perlindungan kelompok rentan dan pemberian jaminan sosial dilakukan melalui bantuan, pendampingan, serta fasilitasi layanan dasar, menegaskan peran strategis Dinas Sosial dalam memperkuat rasa aman masyarakat miskin dan rentan.

Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota

Realisasi kegiatan tahun 2024 mencapai 94,32%, dengan capaian target 100%. Verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala menghasilkan informasi yang akurat, memperkuat basis data sebagai instrumen penting untuk penyaluran bantuan dan perencanaan kebijakan perlindungan sosial.

6. Program Penanganan Bencana

Realisasi anggaran Program Penanganan Bencana tercatat 58,25% dari total yang disediakan, mengingat sifat bencana yang tidak dapat diprediksi. Meski demikian, seluruh bantuan tetap tersalurkan 100% kepada korban secara cepat dan tepat.

Selain itu, capaian kinerja tahun 2024 juga berhasil mencapai target penuh 100%, yang menunjukkan bahwa sekalipun alokasi anggaran tidak sepenuhnya terserap, efektivitas pelayanan penanganan bencana tetap terjaga secara optimal. Hal ini mencerminkan kesiapan Dinas Sosial dalam melindungi masyarakat terdampak sekaligus efisiensi pemanfaatan anggaran

.7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP).

Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi indikator Persentase Terpeliharanya TMP sebesar 97,62%. Seluruh aspek pemeliharaan, mulai dari kebersihan, perawatan lingkungan, hingga perbaikan sarana pendukung, terlaksana hampir sepenuhnya sesuai rencana dengan capaian kinerja realisasi penuh 100%, yang menegaskan bahwa TMP tidak hanya terpelihara dari sisi anggaran dan pelaksanaan fisik, tetapi juga memenuhi standar keberfungsian sebagai sarana penghormatan pahlawan bangsa.

Capaian tersebut sudah mencerminkan target yang terpenuhi secara optimal, sehingga TMP tetap terjaga kelayakannya, sekaligus menjadi pijakan penting untuk meningkatkan kualitas pemeliharaan serta memperkuat nilai edukatif dan historis TMP bagi masyarakat.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024.

Secara keseluruhan, tingkat capaian pelaksanaan program tercatat sebesar 100 %, yang menunjukkan kinerja relatif tinggi dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan sosial.

Hasil tersebut tidak hanya mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program tahun berjalan, tetapi juga selaras dengan NSPK dan sasaran RPJMD Kota Metro 2025–2029, khususnya Misi ke-3. Dengan adanya baseline capaian 2024, indikator, dan target jangka menengah, hasil ini menjadi pijakan penting untuk memastikan Renja 2026 benar-benar terhubung dengan tujuan dan sasaran Renstra 2025–2029 hingga tahun 2030. Capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capai Kinerja Program dan Kegiatan				Keterangan
			Kinerja		Kegiatan		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja	100%	100 %	100 %	96,01%	
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial daerah	100%	100%	100%	98,04 %	
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah warga negara migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah Kab / Kota untuk dipulangkan ke desa / kelurahan asal kewenangan kab / kota.	100%	0	100%	0	
4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase rehabilitasi sosial yang ditangani	100%	100%	100%	88,78 %	
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	94,32 %	
6	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	100%	100%	100%	58,25 %	
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase kebutuhan pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%	100%	100%	97,62%	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TARGET KINERJA 2024	REALISASI	PAGU INDIKATIF	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				5.480.916.429	5.305.865.212
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran			3.698.450.459	3.610.466.745
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12.290.700	12.047.700
	1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	2 dokumen	2 dokumen	5.696.350	5.600.350
	1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 dokumen	1 dokumen	3.519.350	3.427.350

	1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	3.075.000	3.020.000
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan	Terpenuhiya administrasi keuangan perangkat daerah			3.024.815.441	2.955.835.943
	1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang akan dibayarkan gaji dan tunjangan	12 Orang/ bulan	12 Orang/ bulan	2.610.605.441	2.547.941.943
	1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah THL yang akan dibayarkan gaji	18 orang	18 orang	333.200.000	329.200.000
	1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Penatausahaan Keuangan	11 Dokumen	11 Dokumen	62.730.000	60.480.000
	1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	4.230.000	4.228.000
	1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Pelaporan Keuangan Semesteran yang tersusun	2 Laporan	2 Laporan	14.050.000	13.986.000
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah			286.971.150	278.727.868
	1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Listrik Kantor	20 Paket	20 Paket	9.175.000	9.132.200
	1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	3 Paket	75.824.000	69.075.000

	1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Kebersihan, ATK dan makan Minum Kantor	85 Paket	85 Paket	83.970.150	82.689.600
	1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Fotocopy	12 Paket	12 Paket	22.897.000	22.833.240
	1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Langganan surat Kabar dan majalah	8 Dokumen	8 Dokumen	22.872.000	22.872.000
	1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilakukan	17 Laporan	17 Laporan	72.233.000	72.125.828
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			64.343.168	56.685.894
	1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Ketersediaan Materai Kantor	300 Laporan	300 Laporan	4.500.000	4.500.000
	1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening yang akan dbayarkan	2 Laporan	2 Laporan	59.843.168	52185894
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang-barang Milik Daerah sebagai penunjang Urusan Pemerintah Daerah			310.030.000	307.169.340

	1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang teregistrasi dan terpelihara	10 unit kendaraan	10 unit kendaraan	188.510.000	185.932.440
	1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	8 Peralatan	8 Peralatan	21.520.000	21.500.000
	1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruangan yang direhabilitai	1 Unit	1 Unit	100.000.000	99.736.900
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			714.619.150	700.642.995
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Terpenuhinya peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah			714.619.150	700.642.995
	1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas	30 orang	30 orang	269.923.550	266.287.970

	1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas	5 orang	5 orang	40.980.000	39.873.400
	1.06.02.2.03.04	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten / kota	Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan pelatihan;	27 lembaga	27 lembaga	403.715.600	394.481.625
	1.06.03	PROGAM PENANGAN WARNA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				3.000.000	-
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di daerah kabupaten /Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan				3.000.000	-
	1.06.03.2.01.01	Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke desa / Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota	3 orang	3 orang	3.000.000	-

	1.06.04	PROGRAM REHABILITAS SOSIAL	Terpenuhinya presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Bantuan Layanan Sosial			731.913.150	649.787.126
	1.06.04.2.01	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar serta Gelandangan pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam panti			289.559.150	248.233.691
	1.06.04.2.01.01	Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	110 orang	110 orang	86.639.750	86.498.050
	1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	135 orang	135 orang	22.542.850	20.199.800
	1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	11 Orang	38.740.600	37.811.900
	1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	5 orang	6.580.000	879.600

	1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	15 orang	71.103.350	53.827.671
	1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	jumlah penerima bantuan modal usaha bagi penyandang disabilitas; jumlah peserta sosialisasi bagi keluarga penyandang disabilitas; terbentuknya komite penyandang disabilitas	10 orang	10 orang	42.029.400	29.875.210
	1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	jumlah anak yang menerima layanan	21 orang	21 orang	17.304.200	17.035.900
	1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	10 orang	4.619.000	2.105.560
	1.06.04.2.02	Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.			442.354.000	401.553.435

	1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	55 orang	55 orang	75.238.000	112.654.875
	1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Keluarga yang diberikan Layanan	4431 orang	4431 orang	125.657.700	112.654.875
	1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitas Sosial Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Kegiatan HALUN, Gebyar LLI dan	3 dokumen	3 dokumen	241.458.300	239.950.560
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Anank-anak Terlantar yang memperoleh perlindunga dan Jaminan Sosial			278.505.900	262.690.376
	1.06.05.2.02	Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Data Fakir Miskin yang dikelola dan Dapat Dimanfaatkan			278.505.900	262.690.376
	1.06.05.2.02.01	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah data fakir miskin per kelurahan yang terdata	7600 Orang	7600 Orang	34.031.100	32.663.200

	1.06.05.2.02.02	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang Terverifikasi dan Tervalidasi	7600 Keluarga	7600 Keluarga	128.821.800	119.691.316
	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	terlaksana bansos pangan sembako dengan baik	250 keluarga	250 keluarga	83.653.000	78.804.600
	1.06.05.2.02.04	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	kondisi ekonomi masyarakat berkembang	22 orang	22 orang	32.000.000	31.531.260
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Terpenuhinya Bantuan Bencana Alam dan Bencana Sosial			57.452.550	33.466.200
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencanan Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial			57.452.550	33.466.200
	1.06.06.2.01.01	Penyediaan makanan	Jumlah paket bansos makanan dan dapur umum	26 orang	26 orang	57.452.550	33.466.200
	1.06.07	PROGAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan Taman Makam Pahlawan			50.000.000	50.000.000
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				50.000.000	48.811.770

			Terpeliharanya TMP				
	1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan taman makam pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	terpeliharanya dan tertatanya TMP kemala nusantara	1 Makam	1 Makam	50.000.000	48.811.770
	J U M L A H					5.533.941.209	5.305.865.212

Secara keseluruhan, capaian pelaksanaan program tahun 2024 tercatat 100%, menunjukkan kinerja tinggi yang sejalan dengan NSPK serta mendukung sasaran RPJMD Kota Metro 2025–2029, khususnya Misi ke-3. Hasil ini menjadi pijakan penting untuk memastikan Renja 2026 terhubung dengan tujuan dan sasaran Renstra 2025–2029 hingga 2030.

Berdasarkan evaluasi, output program dan kegiatan tercapai penuh (100%), sementara realisasi fisik dan keuangan (RFK) sebesar 87,40%. Perbedaan ini lebih disebabkan faktor eksternal, seperti dinamika bencana alam maupun sosial yang menuntut realokasi anggaran. Meski demikian, substansi kinerja tetap terlaksana sesuai perencanaan, mencerminkan konsistensi pelaksanaan program dengan arah Renstra 2021–2026 dan tetap selaras dengan RPJMD 2025–2029. Untuk memahami keberhasilan tersebut, perlu ditelusuri faktor-faktor utama yang menjadi pendorong pencapaian kinerja.

a. Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

Beberapa faktor utama yang mendorong capaian kinerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2024, antara lain :

1. Penguatan Basis Data dan Teknologi Informasi, melalui ketersediaan data PPKS yang akurat, terintegrasi, dan didukung pemanfaatan teknologi informasi sehingga perencanaan, pendataan, dan layanan sosial menjadi lebih efisien serta tepat sasaran.
2. Dukungan Anggaran dan Kinerja Aparatur, ditandai dengan alokasi anggaran yang memadai serta soliditas aparatur dalam menjaga koordinasi lintas bidang dan perangkat daerah, sehingga penanganan kelompok rentan dapat terlaksana optimal.
3. Kolaborasi Multipihak, meliputi peran aktif masyarakat, lembaga sosial, dan dunia usaha yang mempercepat distribusi bantuan sekaligus memperkuat kelembagaan sosial di tingkat lokal.

b. Implikasi yang Timbul

Dari capaian dan evaluasi Tahun 2024, terdapat beberapa implikasi penting yang perlu dicermati :

1. Kinerja dan Target Renstra, capaian 87,40% menunjukkan arah positif, namun masih terdapat gap yang harus ditutup agar target Renstra 2025–2029 dapat tercapai.
2. Ketergantungan pada Faktor Eksternal dan Data, penanganan bencana yang fluktuatif serta ketergantungan pada kualitas data menuntut validasi berkala agar layanan tetap optimal dan tepat sasaran.
3. Tantangan Inklusivitas dan Kualitas Layanan, masih ada kelompok rentan sulit dijangkau serta kebutuhan peningkatan kualitas SDM dan penyederhanaan layanan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.

c. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

Kebijakan / Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil

1. Penguatan Basis Data dan Teknologi, melalui digitalisasi data PPKS serta pemanfaatan TI untuk meningkatkan akurasi, validitas, dan efektivitas pelayanan.
2. Prioritas Anggaran Program Fundamental, dengan fokus pada perlindungan sosial dasar, pemberdayaan masyarakat, serta penanganan kelompok miskin ekstrem dan rentan.
3. Peningkatan Kualitas Layanan, melalui pengembangan regulasi teknis/SPM bidang sosial serta peningkatan kapasitas aparatur.
4. Kolaborasi dan Antisipasi Risiko, dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, melibatkan mitra eksternal (CSR/lembaga sosial), serta menyiapkan cadangan anggaran penanganan bencana.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Metro dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh atas pelaksanaan Renja Tahun 2024 serta menjadi dasar dalam penyusunan Renja Tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi, capaian anggaran menunjukkan realisasi sebesar 95,88%, sedangkan capaian kinerja tercatat 100%, yang menggambarkan pelaksanaan program berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Angka ini menegaskan konsistensi pelaksanaan program yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan sosial daerah, serta menunjukkan kontribusi positif dalam mewujudkan kesejahteraan bagi kelompok rentan, keluarga miskin, dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Kajian kinerja pelayanan tahun 2024 mencakup empat pilar utama, yaitu :

1. Rehabilitasi sosial, berfokus pada pemulihan fungsi sosial individu dan kelompok rentan melalui pendampingan dan layanan pemulihan;
2. Pemberdayaan sosial, dengan penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan sosial agar mampu mandiri;
3. Perlindungan dan jaminan sosial, melalui penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan responsif terhadap kelompok miskin dan rentan;
4. Pengelolaan data kemiskinan, sebagai instrumen penting dalam perencanaan berbasis bukti untuk meningkatkan akurasi program perlindungan sosial.

Meskipun capaian kinerja tahun 2024 secara umum menunjukkan hasil optimal, terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian untuk tahun berjalan (2025) dan perencanaan 2026, di antaranya :

- ~ Masih adanya peningkatan jumlah kelompok rentan akibat tekanan ekonomi dan dampak sosial pascapandemi;
- ~ Kebutuhan percepatan pemutakhiran data kemiskinan yang terintegrasi lintas sektor agar lebih responsif terhadap dinamika masyarakat;
- ~ Tantangan peningkatan kualitas layanan publik agar lebih inklusif, ramah disabilitas, dan merata di seluruh wilayah Kota Metro.

Analisis ini sejalan dengan arah Renstra Dinas Sosial 2025–2029 yang berpedoman pada UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mendukung pencapaian Misi ke-3 RPJMD Kota Metro 2025–2029, yaitu “Membangun Ekonomi dan Sosial yang Inklusif serta Berdaya Saing.”

Keterhubungan tersebut tercermin pada indikator kinerja strategis, yaitu :

- Persentase PPKS yang mendapat layanan sosial, dengan capaian 100% pada 2024 dan target 97,7% pada 2026 sesuai arah Renstra yang menekankan keberlanjutan layanan;

- Nilai Survei Kepuasan Masyarakat bidang sosial, dari 90,78 poin (2024) ditargetkan 92 poin (2026);
- Cakupan perlindungan sosial keluarga miskin dan rentan, dari 22,6% (2025) tetap terjaga sekitar 22% (2026);
- Penguatan PSKS melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, kader sosial, dan jejaring masyarakat.

Dengan demikian, analisis kinerja dan isu strategis tidak hanya menjadi refleksi capaian 2024, tetapi juga dasar penyusunan Renja 2026 agar selaras dengan arah pembangunan jangka menengah. Fokus utama diarahkan pada penguatan basis data PPKS digital, pemetaan kelembagaan sosial, sistem perlindungan sosial adaptif, serta regulasi pendukung layanan dasar dan inklusif.

Capaian kinerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2026 ditinjau melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebagaimana diketahui, pembangunan sosial merupakan upaya perubahan komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kota Metro, ditetapkan sasaran strategis “Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Masyarakat Terhadap Hidup Layak.” Selengkapnya hasil capaian kinerja Tahun 2026 ditunjukkan pada tabel berikut :

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targe t	Realisas i	% Capaia n Kinerja	Target Ahir Renstr a	% Thdp target ahir Renstr a
Indikator Kinerja Utama (IKU) 2026							
1	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Masyarakat Terhadap Hidup Layak	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Mendapat Pelayanan Sosial	97,7 %	97,20%	100%	100%	100%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kota Metro memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial sesuai dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sejalan dengan hasil evaluasi kinerja pelayanan tahun 2024 serta arah pembangunan sosial jangka menengah, terdapat sejumlah isu penting yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan program prioritas Renja Tahun 2026.

Isu-isu penting tersebut antara lain :

1. Pengentasan kemiskinan ekstrem dan perlindungan sosial dasar.

Meskipun capaian indikator pelayanan sosial tahun 2024 cukup positif, masih terdapat tantangan dalam menjangkau keluarga miskin ekstrem, lansia terlantar, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Kondisi ini menuntut adanya penguatan basis data terpadu, pemutakhiran reguler, serta pemanfaatan teknologi digital agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

2. Kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial.

Keterbatasan sarana-prasarana, pemanfaatan SDM yang belum optimal, serta perlunya profesionalisasi aparatur dan relawan sosial masih menjadi hambatan dalam peningkatan kualitas layanan. Peningkatan kompetensi, tata kelola responsif, serta koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar penyelenggaraan pelayanan sosial lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Pemberdayaan dan kemandirian masyarakat rentan.

Upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok miskin, penyandang disabilitas, dan komunitas sosial lokal, masih menghadapi keterbatasan akses ekonomi produktif dan pengembangan keterampilan. Hal ini memerlukan inovasi program berbasis inklusi sosial dan kolaborasi multipihak, sehingga peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dapat lebih optimal dalam mendukung kemandirian.

4. Transformasi digital dan integrasi layanan sosial.

Perubahan kebutuhan masyarakat menuntut adanya digitalisasi data, integrasi sistem informasi, dan penguatan layanan berbasis teknologi. Hal ini sejalan dengan arah Renstra Dinas Sosial 2025–2029 yang menekankan pentingnya inovasi pelayanan, transparansi, serta percepatan respons layanan sosial secara real time.

Dengan demikian, isu-isu strategis ini tidak hanya mencerminkan tantangan yang dihadapi saat ini, tetapi juga menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan dan program prioritas Renja 2026, agar benar-benar selaras dengan Renstra Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2025–2029 dan mendukung pencapaian Misi ke-3 RPJMD Kota Metro: “Membangun Ekonomi dan Sosial yang Inklusif serta Berdaya Saing.”

2.4. Review Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2025, identifikasi isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta hasil review Rancangan Awal RKPD dan usulan masyarakat, Dinas Sosial Kota Metro menyusun rancangan program dan kegiatan untuk Tahun 2026. Rancangan ini disusun untuk menjaga kesinambungan arah kebijakan, sekaligus menjadi instrumen responsif terhadap dinamika kebutuhan sosial di masyarakat.

1. Landasan Penyusunan

Rancangan program dan kegiatan Tahun 2026 berpedoman pada:

Renstra Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2025–2029, yang menekankan sasaran strategis pada penguatan perlindungan sosial adaptif, peningkatan kualitas layanan sosial berbasis data, serta pemberdayaan masyarakat rentan secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini menjadi pijakan utama agar program tahunan tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga konsisten dengan target jangka menengah dalam kerangka RPJMD 2025–2029.

Rancangan Awal RKPD Kota Metro Tahun 2026, yang menempatkan urusan sosial sebagai prioritas pembangunan daerah, terutama pada pengentasan kemiskinan

ekstrem, transformasi layanan sosial berbasis digital, dan peningkatan kemandirian kelompok miskin dan rentan.

Hasil evaluasi Renja Tahun 2025, yang menunjukkan capaian indikator pelayanan relatif baik, namun masih memerlukan penguatan efektivitas program, pemutakhiran basis data, serta peningkatan koordinasi lintas sektor agar dampak pelayanan lebih merata.

Usulan masyarakat, yang dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi publik, maupun kanal aspirasi lainnya. Usulan ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat legitimasi program Dinas Sosial, sekaligus memastikan setiap prioritas benar-benar selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat, khususnya kelompok miskin, rentan, lanjut usia, anak terlantar, dan penyandang disabilitas.

2. Arah Rancangan Program

Rancangan program Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2026 diarahkan pada penguatan pelayanan sosial yang adaptif, inklusif, dan berbasis data terintegrasi, sesuai dengan sasaran strategis Renstra Dinas Sosial 2025–2029 serta arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD 2025–2029. Fokus program tidak hanya merupakan kelanjutan capaian Renja 2025, tetapi juga diproyeksikan untuk mempercepat pencapaian target jangka menengah, khususnya peningkatan kualitas layanan sosial, penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat rentan, dan pemantapan ketahanan sosial masyarakat.

Arah tersebut dituangkan ke dalam beberapa fokus utama sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi Sosial – memperkuat layanan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, dan kelompok rentan lainnya melalui pendekatan berbasis keluarga, komunitas, serta integrasi layanan yang berkelanjutan.
- b. Perlindungan dan Jaminan Sosial – memastikan keberlanjutan program bantuan sosial dengan meningkatkan akurasi basis data, efektivitas penyaluran, serta mekanisme pengaduan masyarakat yang transparan dan akuntabel.

c. Pemberdayaan Sosial – meningkatkan kemandirian kelompok rentan melalui fasilitasi usaha ekonomi produktif, pengembangan keterampilan, dan optimalisasi peran PSKS sebagai mitra strategis penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

d. Penanganan Kemiskinan dan PMKS – menurunkan jumlah keluarga miskin dan PMKS dengan program terpadu, berbasis pemutakhiran data kemiskinan, serta integrasi akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dasar.

e. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Sosial – memperkuat kesiapsiagaan, respon cepat, dan perlindungan sosial adaptif dalam menghadapi bencana sosial maupun bencana alam yang berdampak pada kelompok rentan.

3. Prinsip Pelaksanaan

Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Tahun 2026, Dinas Sosial Kota Metro menerapkan prinsip-prinsip yang konsisten dengan arah kebijakan Renstra Dinas Sosial 2025–2029, sehingga setiap langkah perencanaan dan implementasi dapat berkontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran jangka menengah serta Misi ke-3 RPJMD Kota Metro 2025–2029, yaitu “Membangun Ekonomi dan Sosial yang Inklusif serta Berdaya Saing.” Prinsip yang dimaksud antara lain :

- Keselarasan. Memastikan keterhubungan antara program dan kegiatan dengan visi-misi daerah, RPJMD, serta kebijakan nasional dan provinsi, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan sosial, penguatan perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat rentan.
- Efisiensi dan Efektivitas. Mengoptimalkan hasil dengan sumber daya terbatas, melalui pengelolaan anggaran yang akuntabel, pemanfaatan sarana prasarana secara tepat, dan peningkatan kapasitas SDM. Hal ini diperkuat dengan penerapan digitalisasi data sosial sebagai agenda prioritas Renstra 2025–2029.
- Partisipatif. Mendorong peran aktif masyarakat, lembaga sosial, dan PSKS dalam perencanaan maupun pelaksanaan, sesuai prinsip inklusivitas yang menjadi pilar pelayanan sosial dalam Renstra 2025–2029.
- Kolaboratif. Menjalin sinergi lintas perangkat daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta organisasi sosial untuk memperluas cakupan dan memperkuat keberlanjutan program, selaras dengan pendekatan multi-stakeholder yang diamanatkan dalam Renstra 2025–2029.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2026 tidak hanya berlandaskan dokumen perencanaan formal seperti Rancangan Awal RKPD, tetapi juga diarahkan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui Musrenbang di berbagai tingkatan, konsultasi publik, serta kanal aspirasi yang difasilitasi pemerintah daerah. Hingga tahap ini, proses Musrenbang untuk Tahun 2026 masih berlangsung sehingga data usulan masyarakat belum tersedia. Namun demikian, prinsip perencanaan tetap dipastikan selaras dengan arah kebijakan Renstra Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2025–2029, yang menitikberatkan pada pelayanan sosial inklusif, penguatan kapasitas kelembagaan, serta perluasan akses perlindungan bagi kelompok rentan.

Integrasi antara aspirasi masyarakat, Rancangan Awal RKPD, dan kerangka strategis Renstra 2025–2029 diharapkan dapat memperkuat legitimasi serta relevansi Renja Tahun 2026. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang dirancang tidak hanya menjadi kelanjutan dari capaian sebelumnya, tetapi juga benar-benar mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat Kota Metro, sekaligus mendukung pencapaian sasaran jangka menengah pembangunan sosial daerah secara berkelanjutan.

TABEL
Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2026
Dinas Sosial Kota Metro

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	TIDAK ADA USULAN MASYARAKAT	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menetapkan visi “Indonesia Emas 2045” dengan arah pembangunan menuju negara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Sosial berkontribusi penting terhadap pencapaian Visi 2: Indonesia yang Sejahtera, khususnya dalam penghapusan kemiskinan ekstrem, pengurangan ketimpangan sosial, serta penguatan perlindungan sosial yang inklusif.

Kontribusi tersebut diwujudkan melalui strategi yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan dituangkan dalam Renstra Dinas Sosial Kota Metro 2025–2029, yaitu:

Transformasi Sosial melalui peningkatan kualitas layanan sosial dasar, pemutakhiran data PPKS berbasis digital, serta penguatan kapasitas kelembagaan sosial.

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dengan memperluas jangkauan perlindungan sosial, pemberdayaan kelompok rentan, dan optimalisasi peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Dengan demikian, arah kebijakan Dinas Sosial Kota Metro tidak hanya mendukung pencapaian target nasional menuju Indonesia Emas 2045, tetapi juga memperkuat implementasi RPJMD Kota Metro 2025–2029 pada Misi ke-3: Membangun Ekonomi dan Sosial yang Inklusif serta Berdaya Saing, guna mewujudkan pelayanan sosial yang optimal dan berkelanjutan .

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2025–2029 adalah:

“Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius.”

Visi ini menegaskan bahwa pembangunan Kota Metro lima tahun ke depan diarahkan tidak hanya pada percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis jasa, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang cerdas, berdaya saing, serta berkarakter budaya dan religius.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan Misi Pembangunan Kota Metro 2025–2029, yang menjadi pedoman kebijakan pembangunan daerah. Misi ini mencakup prioritas utama pada penguatan sumber daya manusia, peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif, penyediaan infrastruktur pendukung, serta penguatan budaya dan jati diri masyarakat.

Adapun Misi Pembangunan Kota Metro Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

- Misi 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Adaptif dan Berkarakter.
- Misi 2: Meningkatkan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima.
- Misi 3: Membangun ekonomi dan sosial yang inklusif serta Berdaya Saing.
- Misi 4: Membangun Insfrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan.
- Misi 5: Memperkuat budaya lokal yang religius dan meningkatkan daya tarik wisata.

Melihat visi dan misi pembangunan tersebut, Dinas Sosial Kota Metro memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target pembangunan, khususnya pada misi 3 yaitu **“Membangun Ekonomi dan**

Sosial yang Inklusif serta Berdaya Saing.” Peran ini menuntut adanya analisis yang tepat terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman agar strategi yang dijalankan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk memperkuat makna visi tersebut, dapat dijabarkan dalam empat pilar utama yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, yaitu:

1. Metro Kota Cerdas

Metro Kota Cerdas diwujudkan melalui pembangunan masyarakat yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pelayanan publik.

Dinas Sosial akan berperan dalam memperkuat kecerdasan sosial masyarakat, yakni kemampuan untuk saling memahami, peduli, dan membantu, terutama bagi kelompok rentan. Program-program sosial diarahkan untuk meningkatkan literasi sosial, pengelolaan data kemiskinan yang akurat dan digital, serta pelayanan sosial yang cepat, tepat, dan transparan.

2. Metro Kota Berbasis Jasa

Kota Metro yang berbasis jasa berarti menjadikan sektor jasa sebagai penggerak utama ekonomi lokal. Dalam hal ini, Dinas Sosial akan mengambil peran dengan memastikan kelompok miskin, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi berbasis jasa.

Upaya pemberdayaan sosial diarahkan untuk meningkatkan keterampilan, membuka akses pada peluang usaha, serta mendampingi masyarakat agar mampu memanfaatkan potensi ekonomi kreatif dan jasa berbasis kearifan lokal.

3. Metro Kota Berbudaya

Kota Metro Berbudaya merujuk pada terpeliharanya nilai-nilai luhur dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dinas Sosial berperan dalam memperkuat ketahanan sosial melalui pengarusutamaan nilai budaya gotong royong, solidaritas sosial, dan kepedulian antarwarga.

Nilai-nilai budaya ini diinternalisasikan dalam program pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan masyarakat, serta revitalisasi kegiatan sosial yang berbasis komunitas. Dengan demikian, pembangunan sosial tidak hanya menekankan aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga menjaga jati diri Kota Metro sebagai kota yang berbudaya.

4. Metro Kota Religius

Metro Kota Religius bermakna bahwa pembangunan di Kota Metro berlandaskan nilai-nilai keagamaan yang menekankan akhlak, moral, dan spiritualitas masyarakat. Dinas Sosial berkomitmen mewujudkan masyarakat religius dengan menjunjung tinggi kemanusiaan, persaudaraan, dan kepedulian sosial.

Empat pilar visi “Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius” menjadi landasan pelaksanaan tugas Dinas Sosial. Pilar Metro Kota Cerdas menekankan literasi sosial, pengelolaan data kemiskinan akurat, serta pelayanan responsif dan transparan. Pilar Metro Kota Berbasis Jasa diarahkan pada pemberdayaan kelompok rentan melalui ekonomi kreatif dan sektor jasa berbasis kearifan lokal. Pilar Metro Kota Berbudaya memperkuat ketahanan sosial melalui nilai gotong royong, solidaritas, dan kepedulian. Sedangkan pilar Metro Kota Religius menegaskan bahwa pembangunan sosial harus berlandaskan nilai moral dan spiritual untuk mewujudkan masyarakat berkeadilan, harmonis, dan saling menolong.

Secara keseluruhan, keempat pilar tersebut membentuk arah pembangunan sosial Kota Metro yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai

karakter daerah, serta mendukung visi pembangunan daerah 2025–2029. Rumusan visi ini diwujudkan melalui Misi Pembangunan Kota Metro, yang mencakup peningkatan SDM, tata kelola pemerintahan, pengembangan ekonomi, infrastruktur, serta pelestarian budaya dan identitas lokal.

Dalam konteks tersebut, Dinas Sosial berperan strategis terutama pada Misi ke-3: “Membangun Ekonomi dan Sosial yang Inklusif serta Berdaya Saing.” Peran ini menuntut strategi berbasis analisis peluang dan tantangan agar program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial tidak hanya menyelesaikan masalah sosial jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung target RPJMD 2025–2029 serta arah kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

3.3 Tujuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Metro

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
- b. Memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan keberdayaan sosial;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah sosial;
- d. Meningkatkan peran dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. Memperkuat tata kelola dan manajemen pelayanan sosial agar lebih efektif, akuntabel, dan adaptif.

Mengacu pada rumusan tersebut, tujuan utama penyelenggaraan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial ialah meningkatkan kualitas hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Metro. Hal ini selaras dengan Renstra Dinas Sosial Kota Metro 2025–2029 yang

menekankan sasaran strategis: “Meningkatnya penanganan, perlindungan, dan pemberdayaan sosial bagi PPKS secara inklusif dan berkelanjutan.”

Tujuan tersebut juga konsisten dengan RPJMD Kota Metro 2025–2029, khususnya Misi ke-3: “Membangun Ekonomi dan Sosial yang Inklusif serta Berdaya Saing”, yang menempatkan penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat rentan, dan pemenuhan hak dasar warga sebagai prioritas utama.

Sebagai tindak lanjut, pencapaian tujuan ini akan diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025–2029, yang berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas sekaligus pedoman dalam penyusunan Renja Tahun 2026.

Selengkapnya ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Sasaran dan Indikator Dinas Sosial Tahun 2025-2029

No.	Sasaran	Indikator
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Sosial	Nilai Pelayanan Publik melalui Survey Kepuasan Masyarakat
2.	Meningkatnya Layanan Perlindungan Sosial Tepat guna dan Tepat Sasaran	Cakupan Perlindungan Sosial Bagi Keluarga Miskin dan Rentan

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target TAHUN					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
-1	-2	-3	-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10
NSPK:	T1.		T1:							
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya Pelayanan Sosial yang Optimal dan Inklusif		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat pelayanan sosial	95%	95%	95,3%	95,7 %	95,9 %	96%	96,2%
Sasaran RPJMD Misi Ke 3 :		S1 :	S1.1							
Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak masyarakat terhadap hidup layak		Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Sosial	Nilai Pelayanan Publik berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat	90,78	91,23	91,68	92,13	92,58	93,03	93,48
		S2 :	S2.1							
		Meningkatnya Layanan Perlindungan Sosial Tepat guna dan Tepat Sasaran	Cakupan Perlindungan Sosial Bagi Keluarga Miskin dan Rentan (IKD)	-	22,6%	22,8%	22,10 %	22,11 %	22,12 %	22,13 %

Agar pelaksanaan rencana strategis dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan memperoleh hasil akhir yang baik, maka perlu dilakukan penahapan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Berikut tahapan pelaksanaan pembangunan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029 ditampilkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Tahapan Renstra Dinas Sosial Kota Metro

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
-1	-2	-3	-4	-5
Penguatan Fondasi Program	Tahap Konsolidasi Data dan Layanan	Tahap Peningkatan Program	Tahap Optimalisasi Program	Tahap Kemandirian Berkelanjutan
1. Membangun basis data PPKS terintegrasi digital sebagai fondasi seluruh program, disertai penyusunan standar pelayanan minimum.	1. Mengintegrasikan sistem data dengan Dukcapil dan dinas terkait	1. Mereplikasi model layanan unggulan di seluruh wilayah	1. Menerapkan analisis big data untuk penyusunan kebijakan prediktif	1. Mengkonsolidasikan seluruh sistem berbasis teknologi mutakhir
2. Pemetaan kapasitas kelembagaan	2. Mengembangkan model intervensi spesifik lokasi,	2. Memperkuat layanan dengan melakukan sertifikasi pekerja sosial	2. Harmonisasi program lintas sektor	2. Menstandarisasi layanan hingga nasional
3. Penyiapan kerangka regulasi untuk menjamin kualitas layanan dasar bagi kelompok rentan.	3. Memperkuat kapasitas SDM melalui pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan akurasi dan cakupan layanan.	3. Mengimplementasikan sistem pengaduan terpadu	3. Akreditasi lembaga pelayanan sosial	3. Menerapkan evaluasi dampak berbasis outcome
	4. Memperkuat sinergitas antar lembaga atau organisasi sosial antar lembaga seperti lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), perguruan tinggi (lembaga	4. Memunculkan inovasi layanan dinas sosial dengan mengintegrasikan layanan digital guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia	4. Pengembangan skema pembiayaan inovatif untuk meningkatkan efektivitas intervensi sosial.	4. Mengembangkan model pembiayaan mandiri berbasis komunitas untuk menjamin keberlanjutan

	pendidikan tinggi), dan stakeholder lainnya guna memperluas jangkauan layanan.			
			5. Melakukan Pemantapan kinerja dengan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara menyeluruh terkait kinerja suatu program, kegiatan atau kebijakan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana di tahun 2026-2029	5. Identifikasi program-program yang telah terbukti berhasil selama 5 tahun dan akan dilanjutkan di tahun 2030

3.4. Program dan Kegiatan Prioritas

1. *Dalam rangka* mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2025–2029, penyusunan program dan kegiatan pada Renja Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian misi pembangunan daerah, khususnya Misi ke-3 RPJMD, yaitu “Membangun Ekonomi dan Sosial yang Inklusif serta Berdaya Saing.”

Program dan kegiatan tersebut diprioritaskan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat, terutama kelompok miskin, rentan, lanjut usia, penyandang disabilitas, anak terlantar, serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Fokus intervensi meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan jaminan sosial, serta penguatan basis data sosial yang akurat dan terintegrasi.

Program dan kegiatan prioritas yang dirumuskan tidak hanya ditujukan pada pencapaian indikator kinerja perangkat daerah, tetapi juga diarahkan agar memberikan dampak nyata berupa peningkatan kualitas hidup dan

kemandirian masyarakat rentan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2026 disusun selaras dengan Renstra 2025–2029 dan memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan sosial dalam RPJMD Kota Metro 2025–2029.

2. *Penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050.5889 Tahun 2021 mengenai verifikasi, validasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah. Penyesuaian ini dimaksudkan agar sistem perencanaan lebih sistematis, terukur, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku secara nasional.*

Dalam kerangka Renstra Dinas Sosial Kota Metro 2025–2029, program dan kegiatan diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah, khususnya peningkatan kualitas layanan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan masyarakat rentan. Dengan demikian, setiap program yang disusun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada pencapaian hasil yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Program dan kegiatan prioritas dalam Renja Tahun 2026 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,

dengan kegiatan :

Program ini memiliki indikator : Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- ❖ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- ❖ Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD

- ❖ Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ❖ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- ❖ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- ❖ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- ❖ Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- ❖ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- ❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ❖ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ❖ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- ❖ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ❖ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - ❖ Pengadaan Mebel
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ❖ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
 - Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ❖ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - ❖ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Pemberdayaan Sosial,

dengan kegiatan :

Program ini memiliki indikator :

Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan Persentase Dokumen Izin pengumpulan sumbangan lintas kabupaten/kota yang diterbitkan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - ❖ Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan
 - Kabupaten/Kota

- ❖ Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

 - Kewenangan Kabupaten/Kota

- ❖ Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan

 - Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Penanganan Warga Negara Imigran Korban Tindak Kekerasan,

Dengan kegiatan :

Program ini memiliki Indikator : Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di daerah kabupaten /Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan, dengan sub kegiatan :

 - ❖ Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dari Titik

 - Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke desa / Kelurahan Asal

4. Program Rehabilitasi Sosial,

dengan kegiatan :

Program ini memiliki indikator : Persentase Anak Terlantar yang mandiri, Persentase Tuna Sosial yang mandiri, Persentase Penyandang Disabilitas yang mandiri, dan Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial, dengan sub kegiatan :

- ❖ Penyediaan Permakanan
- ❖ Penyediaan Sandang
- ❖ Penyediaan Alat Bantu
- ❖ Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- ❖ Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
- ❖ Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
- ❖ Pemberian Pelayanan Kedaruratan
- ❖ Pemberian Layanan Rujukan

b. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, dengan sub kegiatan :

- ❖ Pemberian Layanan Kedaruratan
- ❖ Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar
- ❖ Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota

5. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial,

dengan kegiatan :

Program ini memiliki indikator : Persentase Fakir Miskin yang terentaskan dan Persentase KPM PKH yang telah Graduasi , dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
- ❖ Pengeloaan data Fakir MiskinCakupan Daerah Kabupaten /Kota
 - ❖ Pendataan Fakir Miskin cakupan Daerah kabupaten Kota
 - ❖ Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - ❖ Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

6. Program Penanganan Bencana,

dengan kegiatan :

Program ini memiliki indikator : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :

❖ Penyediaan Permakanan

7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan,

dengan kegiatan :

Program ini memiliki indikator : Persentase fasilitas sarana dan prasarana kesejahteraan sosial yang terpelihara dengan baik, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi, dengan sub kegiatan :

❖ Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Berikut lebih terperinci Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan serta pendanaan Dinas Sosial Kota Metro selama 5 (Lima) Tahun dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029.

Tabel 4.3 Rincian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dinas Sosial Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				5.500.390.895		5.908.844.990		6.360.662.577		6.704.558.882		7.049.037.631		
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.784.698.495		4.025.513.801		4.376.438.691		4.649.957.832		4.926.492.081		
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, efektif dan efisien	Nilai Sakip SKPD (Angka)	69,56	70,5	3.784.698.495	71	4.025.513.801	71,5	4.376.438.691	72	4.649.957.832	72,5	4.926.492.081	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial	
1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.723.700		30.769.622		40.851.255		48.915.511		63.980.089		
Pemenuhan Kebutuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	12.723.700	2	30.769.622	2	40.851.255	2	48.915.511	2	63.980.089		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.575.000		11.602.875		13.630.889		12.659.044		22.687.339		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	5.575.000	2	11.602.875	2	13.630.889	2	12.659.044	2	22.687.339		
1.06.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.139.350		10.139.350		13.180.847		18.201.751		21.222.760		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	4.139.350	2	10.139.350	2	13.180.847	2	18.201.751	2	21.222.760		
1.06.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3.009.350		9.027.397		14.039.519		18.054.716		20.069.990		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	3.009.350	2	9.027.397	2	14.039.519	2	18.054.716	2	20.069.990		
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.025.253.072		3.083.950.453		3.120.271.986		3.211.378.189		3.325.079.484		
Pembayaran Gaji PNS, THL dan Pengelolaan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	406	3.025.253.072	406	3.083.950.453	406	3.120.271.986	406	3.211.378.189	406	3.325.079.484		

	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.633.598.122		2.636.981.228		2.663.598.122		2.736.148.647		2.835.703.795		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	406	2.633.598.122	406	2.636.981.228	406	2.663.598.122	406	2.736.148.647	406	2.835.703.795		
1.06.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				316.800.000		350.740.000		351.488.700		355.246.144		357.012.374		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	316.800.000	12	350.740.000	12	351.488.700	12	355.246.144	12	357.012.374		
1.06.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				59.400.000		62.697.000		64.575.278		67.295.462		69.596.940		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	59.400.000	12	62.697.000	12	64.575.278	12	67.295.462	12	69.596.940		
1.06.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.230.000		11.251.150		14.272.406		19.293.768		24.315.237		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3	3	4.230.000	3	11.251.150	3	14.272.406	3	19.293.768	3	24.315.237		
1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				11.224.950		22.281.075		26.337.480		33.394.168		38.451.138		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3	3	11.224.950	3	22.281.075	3	26.337.480	3	33.394.168	3	38.451.138		
1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				24.650.000		30.773.250		34.519.888		41.021.602		46.146.710		
-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	24.650.000	1	30.773.250	1	34.519.888	1	41.021.602	1	46.146.710		
1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				24.650.000		30.773.250		34.519.888		41.021.602		46.146.710		

Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	24.650.000	1	30.773.250	1	34.519.888	1	41.021.602	1	46.146.710		
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				249.257.150		374.503.436		451.755.953		526.358.495		580.279.806		
Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	7	249.257.150	7	374.503.436	7	451.755.953	7	526.358.495	7	580.279.806		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	17	17		17		17		17		17			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				17.997.000		32.086.985		48.177.420		57.268.307		64.359.649		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	17.997.000	12	32.086.985	12	48.177.420	12	57.268.307	12	64.359.649		
1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48.082.000		63.322.410		68.564.022		78.806.842		84.050.876		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	7	48.082.000	7	63.322.410	7	68.564.022	7	78.806.842	7	84.050.876		
1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				72.767.550		123.131.388		163.497.045		188.864.530		208.233.853		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	72.767.550	12	123.131.388	12	163.497.045	12	188.864.530	12	208.233.853		
1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				26.361.600		41.493.408		46.625.875		55.102.767		60.892.799		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	26.361.600	12	41.493.408	12	46.625.875	12	55.102.767	12	60.892.799		
1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				22.872.000		37.986.360		43.101.292		52.216.798		58.332.882		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	22.872.000	12	37.986.360	12	43.101.292	12	52.216.798	12	58.332.882		
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				61.177.000		76.482.885		81.790.299		94.099.251		104.409.747		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	17	17	61.177.000	17	76.482.885	17	81.790.299	17	94.099.251	17	104.409.747		

1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				34.120.000		41.578.216		45.578.216		48.285.819		51.578.216		
Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah OPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	12	22	34.120.000	22	41.578.216	22	45.578.216	22	48.285.819	22	51.578.216		
1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				34.120.000		41.578.216		45.578.216		48.285.819		51.578.216		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	12	22	34.120.000	22	41.578.216	22	45.578.216	22	48.285.819	22	51.578.216		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				264.413.573		240.933.330		268.333.573		282.979.474		290.979.474		
Pemenuhan Kebutuhan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6	6	264.413.573	6	240.933.330	6	268.333.573	6	282.979.474	6	290.979.474		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.580.000		6.602.900		8.500.000		17.000.000		21.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6	6	4.580.000	6	6.602.900	6	8.500.000	6	17.000.000	6	21.000.000		
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				259.833.573		234.330.430		259.833.573		265.979.474		269.979.474		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	259.833.573	12	234.330.430	12	259.833.573	12	265.979.474	12	269.979.474		
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				174.281.000		223.005.494		415.127.820		491.018.742		568.448.302		
Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	32	32	174.281.000	32	223.005.494	32	415.127.820	32	491.018.742	32	568.448.302		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4		4		4		4		4			
1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				62.770.000		62.770.000		188.510.000		190.510.000		194.510.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	10	62.770.000	10	62.770.000	10	188.510.000	10	190.510.000	10	194.510.000		
1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				21.520.000		31.627.600		38.735.738		49.844.417		58.985.973		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	32	32	21.520.000	32	31.627.600	32	38.735.738	32	49.844.417	32	58.985.973		
1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				89.991.000		128.607.894		187.882.082		250.664.325		314.952.329		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	89.991.000	4	128.607.894	4	187.882.082	4	250.664.325	4	314.952.329		

1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				827.447.150		853.221.689		887.447.150		897.447.150		912.447.150		
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	100	52	827.447.150	64	853.221.689	76	887.447.150	88	897.447.150	100	912.447.150	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial	
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				827.447.150		853.221.689		887.447.150		897.447.150		912.447.150		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Lembaga PSKS yang memperoleh pembinaan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	15	18	827.447.150	20	853.221.689	22	887.447.150	24	897.447.150	26	912.447.150		
	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	408	408		408		408		408					
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				530.274.950		545.274.950		560.274.950		565.274.950		575.274.950		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	15	18	530.274.950	20	545.274.950	22	560.274.950	24	565.274.950	26	575.274.950		
1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota				297.172.200		307.946.739		327.172.200		332.172.200		337.172.200		
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	408	408	297.172.200	408	307.946.739	408	327.172.200	408	332.172.200	408	337.172.200		
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				587.212.850		617.212.850		637.212.850		656.212.850		687.212.850		
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya (%)	100	80	587.212.850	85	617.212.850	90	637.212.850	90	656.212.850	100	687.212.850	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial	
	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya (%)	100	80		85		90		90		100			
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya (%)	100	80		85		90		90		100			
	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya (%)	100	80		85		90		90		100			
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhannya (%)	100	80		85		90		90		100			

1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				264.169.850		290.587.250		304.151.875		318.151.875		344.151.875		
Persentase Jumlah Orang Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	264.169.850	15	290.587.250	15	304.151.875	15	318.151.875	15	344.151.875		
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25				25				25			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	21	21		21		21		21		21			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	110	110		110		110		110		110			
	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	13	13		20		20		20		20			

	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	20		20	20		20		20				
	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Orang)	0	2		2	2		2		2				
	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	2		2	2		2		2				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	70	70		75		80		85		90			
	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (Orang)	0	2		2		2		2		2			
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan				91.099.000		91.564.495		95.032.317		97.502.479		102.974.991		
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	110	110	91.099.000	110	91.564.495	110	95.032.317	110	97.502.479	110	102.974.991		
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				35.908.700		48.000.000		51.000.000		55.432.552		60.862.267		
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	70	70	35.908.700	75	48.000.000	80	51.000.000	85	55.432.552	90	60.862.267		
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu				41.230.000		41.230.000		41.230.000		41.230.000		41.230.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	41.230.000	15	41.230.000	15	41.230.000	15	41.230.000	15	41.230.000		
1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				6.686.800		10.266.749		12.266.749		12.266.749		13.266.749		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	5	6.686.800	5	10.266.749	5	12.266.749	5	12.266.749	5	13.266.749		
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				21.835.700		30.000.000		30.000.000		33.000.000		37.000.000		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	20	21.835.700	20	30.000.000	20	30.000.000	20	33.000.000	20	37.000.000		

1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				28.138.400		28.138.400		28.138.400		28.138.400		31.138.400		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	13	13	28.138.400	20	28.138.400	20	28.138.400	20	28.138.400	20	31.138.400		
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000		
1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan				19.264.200		19.360.521		23.457.324		27.554.610		34.652.383		
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	21	21	19.264.200	21	19.360.521	21	23.457.324	21	27.554.610	21	34.652.383		
1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000		
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan				4.007.050		6.027.085		7.027.085		7.027.085		7.027.085		
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	4.007.050	25	6.027.085	25	7.027.085	25	7.027.085	25	7.027.085		
1.06.04.2.01.0014 - Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000		

1.06.04.2.01.0015 - Fasilitas Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Orang)	0	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000		
1.06.04.2.01.0016 - Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000		
1.06.04.2.01.0017 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000		
1.06.04.2.01.0018 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (Orang)	0	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000		
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				323.043.000		326.625.600		333.060.975		338.060.975		343.060.975		
Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5.548	5.548	323.043.000	5.548	326.625.600	5.548	333.060.975	5.548	338.060.975	5.548	343.060.975		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	35	35				35				35			35
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2				2				2			2
1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan				59.417.400		63.000.000		69.435.375		74.435.375		79.435.375		
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	35	35	59.417.400	35	63.000.000	35	69.435.375	35	74.435.375	35	79.435.375		

1.06.04.2.02.0010 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				45.747.200		45.747.200		45.747.200		45.747.200		45.747.200				
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5.548	5.548	45.747.200	5.548	45.747.200	5.548	45.747.200	5.548	45.747.200	5.548	45.747.200				
1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				217.878.400		217.878.400		217.878.400		217.878.400		217.878.400				
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	217.878.400	2	217.878.400	2	217.878.400	2	217.878.400	2	217.878.400				
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				235.211.100		265.211.100		295.211.100		325.255.500		335.200.000				
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Angka)	4.400	4.450	235.211.100	4.500	265.211.100	4.555	295.211.100	4.600	325.255.500	4.650	335.200.000	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial			
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian (%)	50	52		54		55		56		57					
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	50	52		54		55		56		57					
	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%)	50	52		54		55		56		57					
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				235.211.100		265.211.100		295.211.100		325.255.500		335.200.000				
Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7.500	7.500	235.211.100	7.200	265.211.100	7.000	295.211.100	6.800	325.255.500	6.500	335.200.000				
	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	13.000	13.000		12.800		12.600		12.400		12.200					
	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	22	22		27		32		37		42					
	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	13.000	13.000		12.800		12.600		12.400		12.200					
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				34.031.100		38.201.256		44.372.262		51.544.123		54.716.844				
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	13.000	13.000	34.031.100	12.800	38.201.256	12.600	44.372.262	12.400	51.544.123	12.200	54.716.844				
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				91.082.900		107.046.928		112.322.685		119.834.297		123.348.469				

Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	22	22	91.082.900	27	107.046.928	32	112.322.685	37	119.834.297	42	123.348.469		
1.06.05.2.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				78.097.100		82.487.586		88.880.023		96.274.424		103.670.796		
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7.500	7.500	78.097.100	7.200	82.487.586	7.000	88.880.023	6.800	96.274.424	6.500	103.670.796		
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				32.000.000		37.475.330		49.636.130		57.602.656		53.463.891		
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	13.000	13.000	32.000.000	12.800	37.475.330	12.600	49.636.130	12.400	57.602.656	12.200	53.463.891		
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				47.685.550		47.685.550		64.352.786		75.685.550		87.685.550		
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	50	52	47.685.550	54	47.685.550	55	64.352.786	56	75.685.550	57	87.685.550	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya (%)	50	52		54		55		56		57			
	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	50	52		54		55		56		57			
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				47.685.550		47.685.550		64.352.786		75.685.550		87.685.550		
Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang menerima pelayanan kebutuhan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	47.685.550	60	47.685.550	70	64.352.786	80	75.685.550	90	87.685.550		
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan				47.685.550		47.685.550		64.352.786		75.685.550		87.685.550		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	47.685.550	60	47.685.550	70	64.352.786	80	75.685.550	90	87.685.550		
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				18.135.750		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya tata kelola TamanMakam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	50	52	18.135.750	54	100.000.000	55	100.000.000	56	100.000.000	58	100.000.000	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial	
1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				18.135.750		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

Persentase penyelesaian pemeliharaan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1	1	18.135.750	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				18.135.750		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1	1	18.135.750	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran strategis Renstra Dinas Sosial 2025–2029, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan sosial, penguatan perlindungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat rentan. Penyusunan rencana kerja ini juga memperhatikan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kota Metro Tahun 2026, sehingga program dan kegiatan yang ditetapkan benar-benar mendukung pencapaian Misi ke-3 RPJMD 2025–2029: “Membangun Ekonomi dan Sosial yang Inklusif serta Berdaya Saing.”

Berdasarkan prioritas tersebut, Dinas Sosial Kota Metro merencanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang terukur, dengan memperhatikan indikator kinerja dan estimasi kebutuhan pendanaan. Perencanaan ini tidak hanya menekankan kesinambungan dengan capaian tahun sebelumnya, tetapi juga diarahkan pada penguatan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan.

Detail mengenai program, kegiatan, indikator kinerja, serta kebutuhan pendanaan disajikan dalam tabel berikut sebagai rencana tahunan 2026 sekaligus prakiraan untuk tahun berikutnya (n+1).

RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH																
DINAS SOSIAL KOTA METRO																
TAHUN 2026																
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						5.500.390.895								
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah			100%		3.724.698.495								
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10 Dokumen		12.723.700	Kota Metro					10 Dokumen		
	1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 dokumen		5.575.000	Kota Metro					2 dokumen	2.999.950	
	1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			4 dokumen		4.139.350	Kota Metro					4 dokumen	4.021.950	
	1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			4 dokumen		3.009.350	Kota Metro					4 dokumen	2.999.950	

1.06.01.2.06	Administrasi Umum	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah			12 Bulan		249.257.150	Kota Metro					12 Bulan		
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Listrik Kantor			20 jenis alat listrik		17.997.000	Kota Metro					20 jenis alat listrik	9.174.000	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3 jenis		48.082.000	Kota Metro					3 jenis		
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Kebersihan, ATK dan makan Minum Kantor			85 jenis		72.767.550	Kota Metro					85 jenis	127.569.900	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Fotocopy			12 Jenis Barang Cetak & Penggandaan Surat		26.361.600	Kota Metro					12 Jenis Barang Cetak & Penggandaan Surat	26.889.200	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Langganan surat Kabar dan majalah			8 Surat Kaabar		22.872.000	Kota Metro					8 Surat Kaabar	19.272.000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilakukan			17 kali		61.177.000	Kota Metro					17 kali	52.148.000	

1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12 Bulan		3.025.253.072	Kota Metro	APBN				12 Bulan		
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN			23 ASN		2.633.598.122						23 ASN		
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			13 THL		316.800.000	Kota Metro	APBN				13 THL	148.800.000	
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			11 orang		59.400.000	Kota Metro	APBN				11 orang	63.600.000	
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			3 Laporan		4.230.000	Kota Metro	APBN				1 dokumen	4.639.900	
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Pelaporan Keuangan Semesteran yang tersusun			2 Dokumen		11.224.950	Kota Metro	APBN				2 Dokumen	10.303.950	
1.06.01.2.05	Administrasi Umum				12 Bulan		48.650.000	Kota Metro					12 Bulan		
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			47 Pak		48.650.000	Kota Metro							

1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					34.120.000	Kota Metro						2 Sub Kegiatan		
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			22 Unit	34.120.000									
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			2 Sub Kegiatan	264.413.573	Kota Metro						2 Sub Kegiatan		
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Ketersediaan Materai Kantor			300 Materai	4.580.000	Kota Metro						300 Materai	4.000.000	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening yang akan dbayarkan			2 Jenis	259.833.573	Kota Metro						2 Jenis	63.677.546,52	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang-barang Milik Daerah sebagai penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3 Sub Kegiatan	114.281.000	Kota Metro						3 Sub Kegiatan		
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang teregistrasi dan terpelihara			10 unit kendaraan	62.770.000	Kota Metro						10 unit kendaraan	166.780.000	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara			40 unit	21.520.000	Kota Metro						40 unit	30.450.000	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruangan yang direhabilitai			Perbaikan 1 ruang data	5.991.000	Kota Metro						Perbaikan 1 ruang data	19.980.000	

1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)					827.447.150									
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Terpenuhinya peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah			4 Sub Kegiatan		827.447.150	Kota Metro					4 Sub Kegiatan			
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			18 Lembaga		530.274.950	Kota Metro					30 orang		255.808.500	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya			444 orang		297.172.200	Kota Metro					5 orang		76.000.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITAS SOSIAL	Terpenuhinya presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Bantuan Layanan Sosial					587.212.850	Kota Metro								
1.06.04.2.01	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar serta Gelandangan pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam panti					254.169.850	Kota Metro								
1.06.04.2.01.01	Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			60 Orang		93.099.000	Kota Metro					60 Orang			
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			60 Orang		37.908.700	Kota Medtro					60 Orang		31.400.000	

1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		8 unit	43.230.000	Kota Metro		8 unit	50.000.000	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		30 orang	6.686.800	Kota Metro		30 orang		
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		10 orang	21.835.700	Kota Metro		10 orang	50.000.000	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah penerima bantuan modal usaha bagi penyandang disabilitas; jumlah peserta sosialisasi bagi keluarga penyandang disabilitas; terbentuknya komite penyandang disabilitas		UEP 10 org; sosialisasi keluarga penyandang disabilitas 30 org	28.138.400	Kota Metro		UEP 10 org; sosialisasi keluarga penyandang disabilitas 30 org	69.998.100	
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	jumlah anak yang menerima layanan		20 anak	19.264.200	Kota Metro		20 anak	35.111.200	
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		10 orang	4.007.050	Kota Metro		10 orang	5.000.000	
1.06.04.2.02	Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.		100 Orang dan 13 kegiatan	333.043.000	Kota Metro		100 Orang dan 13 kegiatan		
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	61.417.400	Kota Metro		Orang	85.999.900	

1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Keluarga yang diberikan Layanan			4.350 Keluarga		49.747.200	Kota Metro					4.350 Keluarga	85.086.000	
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitas Sosial Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Kegiatan HALUN, Gebyar LLI			Keg. HALUN 3000 peserta, Keg LLI 1000 peserta		221.878.400	Kota Metro					Keg. HALUN 3000 peserta, Keg LLI 1000 peserta	414.311.500	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Anank-anak Terlantar yang memperoleh perlindunga dan Jaminan Sosial			20 Orang		295.211.100	Kota Metro					20 Orang		
1.06.05.2.02	Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Data Fakir Miskin yang dikelola dan Dapat Dimanfaatkan			9.205 Jiwa		295.211.100	22 Kelurahan					9.205 Jiwa		
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata			2520 Orang		77.351.100	22 Kelurahan					9.205 Jiwa	36.100.000	
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			16 Orang		24.620.000	22 Kelurahan					9.205 Jiwa	69.766.300	
1.06.05.2.02.06	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			200 Orang		106.949.200	Metro					8000 kpm	53.663.000	
1.06.05.2.02.08	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan			14000 Usulan		86.290.800	Metro					30 orang	38.537.000	

	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Terpenuhinya Bantuan Bencana Alam dan Bencana Sosial					47.685.550								
	1.06.06.2.0 1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial			100%		47.685.550						100%		
	1.06.06.2.0 1.01	Penyediaan makanan	Jumlah paket bansos makanan dan dapur umum			40 Orang		47.685.550	Kota Metro					75 paket dan dapur untuk konsumsi 1000 orang		
	1.06.07	PROGAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan Taman Makam Pahlawan					18.135.750								
	1.06.07.2.0 1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya TMP					18.135.750	Kota Metro							
	1.06.07.2.0 1.02	Pemeliharaan taman makam pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	terpeliharanya dan tertatanya TMP kemala nusantara			1 paket		18.135.750	Kota Metro					1 paket	37.019.500	
	JUMLAH							5.500.390.895						-		

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2026 merupakan dokumen operasional tahunan yang menjabarkan Renstra Dinas Sosial 2025–2029 dan mendukung pencapaian RPJMD Kota Metro, khususnya Misi ke-3: “Membangun Ekonomi dan Sosial yang Inklusif serta Berdaya Saing.” Renja ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan, sekaligus memastikan arah pembangunan sosial tetap terintegrasi, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah.

Evaluasi tahun sebelumnya menunjukkan adanya capaian positif, terutama dalam peningkatan layanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Namun, keberlanjutan dan penguatan kualitas layanan tetap menjadi perhatian, terutama dalam hal ketepatan sasaran bantuan, pemutakhiran data sosial, serta penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Hal ini menuntut adanya konsistensi implementasi program berbasis data, responsif terhadap dinamika sosial, serta akuntabel dalam penggunaan sumber daya.

Sebagai kesimpulan, Renja 2026 menegaskan komitmen Dinas Sosial Kota Metro untuk :

1. Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak dasar kelompok rentan melalui layanan sosial yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
2. Memperkuat peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dunia usaha, serta masyarakat sipil dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
3. Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pencapaian sasaran strategis Renstra 2025–2029.
4. Menjamin tata kelola program sosial yang transparan, partisipatif, dan berbasis akuntabilitas kinerja.

Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman internal Dinas Sosial, tetapi juga menjadi instrumen publik untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Arah tindak lanjut ke depan adalah melaksanakan Renja 2026.

Secara konsisten, melakukan evaluasi berkala, serta menyiapkan langkah adaptif agar pelayanan sosial di Kota Metro senantiasa optimal dalam mendukung terwujudnya Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius.

Metro, September 2025

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA METRO



YULIWATI, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 196807031993022001